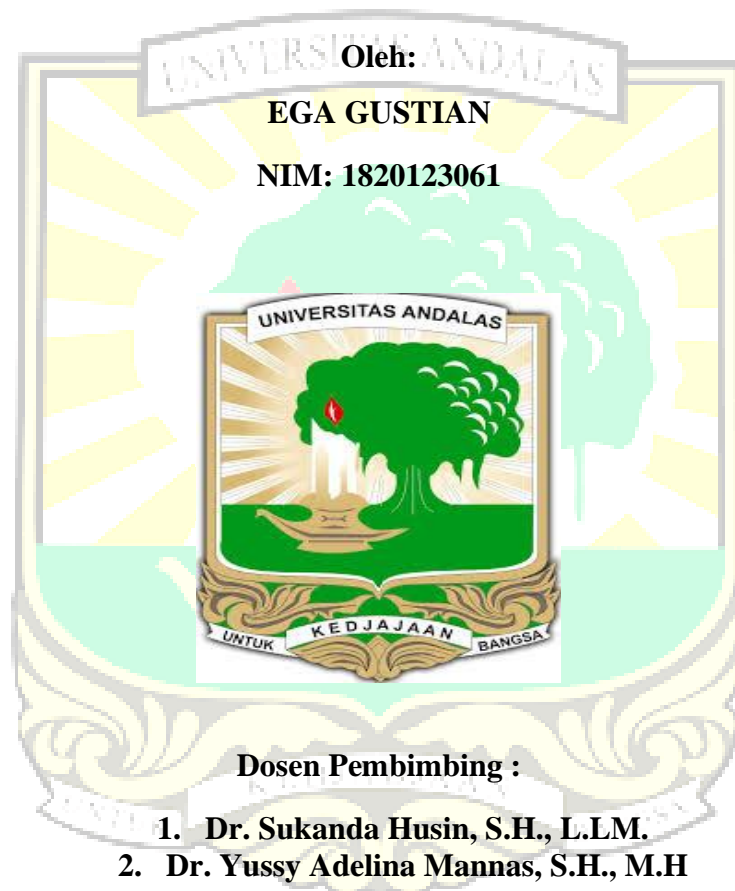


**KEPASTIAN HUKUM PENYIMPANAN PROTOKOL NOTARIS
SECARA DIGITAL
(SUATU URGENSI POLITIK HUKUM KENOTARIATAN)**

TESIS

Diajukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan
Pada Fakultas Hukum
Universitas Andalas



PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2022

KEPASTIAN HUKUM PENYIMPANAN PROTOKOL NOTARIS SECARA DIGITAL (SUATU URGENSI POLITIK HUKUM KENOTARIATAN)

(Ega Gustian, 1820123061, Program Magister Kenotariatan, Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 89 Halaman, 2022)

ABSTRAK

Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan Arsip Negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1) huruf b, Pasal 58, Pasal 59, dan Pasal 63 UUJN/UUJN-P, Notaris bertanggung jawab menyimpan akta dan Protokol Notaris sepanjang hayat jabatannya dan akan diteruskan oleh Notaris lain atau penggantinya. Sesuai perkembangan zaman, sudah saatnya protokol Notaris disimpan dan dipelihara secara digital. Atas uraian tersebut, penulis melakukan penelitian terkait pengaturan penyimpanan protokol Notaris dan kepastian hukum penyimpanan protokol Notaris secara digital serta tanggung jawab Notaris dalam menyimpan protokol Notaris. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta sifat penelitian deskriptif analitis. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder, dengan analisis kualitatif. Adapun hasil penelitiannya yakni pengaturan penyimpanan protokol Notaris diatur dalam UUJN/UUJN-P. Penyimpanan protokol Notaris dilakukan oleh Notaris, Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti, dan MPD. Di dalam UUJN/UUJN-P tidak diatur secara jelas, apakah penyimpanan protokol Notaris hanya dilakukan dengan media kertas (konvensional) atau dapat disimpan secara digital menggunakan media elektronik. Hal ini disebabkan karena protokol Notaris merupakan arsip negara, sedangkan UU Kearsipan memberikan pengaturan terkait dengan diperbolehkan melakukan penyimpanan arsip menggunakan media elektronik. Tanggung jawab hukum yang ditimbulkan atas terjadinya pelanggaran atau perbuatan melawan hukum, berlaku ketentuan hukum umum baik secara perdata, pidana, maupun administrasi kepada Notaris yang bersangkutan. Tanggung jawab Notaris pemegang protokol lainnya adalah merahasiakan data pribadi para pihak sehubungan dengan perbuatan hukum yang dituangkan dalam bentuk akta autentik. Belum adanya aturan yang mengatur mengenai penyimpanan protokol Notaris secara digital, menimbulkan kekosongan norma. Sehingga penyimpanan protokol Notaris secara digital hanya dapat berfungsi sebagai data cadangan.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Protokol Notaris, Notaris.

**LEGAL CERTAINTY OF DIGITAL NOTARY PROTOCOL STORAGE
(A POLITICAL URGENCY OF NOTARIAL LAW)**

(Ega Gustian, 1820123061, Notarial Master Program, Postgraduate Faculty of Law,
Andalas University, 89 Pages, 2022)

ABSTRACT

Notary protocol is a collection of documents which are state archives that must be stored and maintained by a Notary in accordance with the provisions of the legislation. Based on Article 15 paragraph (1), Article 16 paragraph (1) letter b, Article 58, Article 59, and Article 63 UUJN/UUJNP, the Notary is responsible for keeping the Notary's deed and protocol throughout the life of his office and will be forwarded by another Notary or his replacement. According to the times, it is time for Notary protocols to be stored and maintained digitally. Based on this description, the authors conducted research related to the regulation of Notary protocol storage and legal certainty of digital Notary protocol storage and the responsibility of Notaries in storing Notary protocols. The research method used is normative juridical, with a statutory approach and descriptive analytical research. The types and sources of data used are secondary data, with qualitative analysis. As for the results of the research, the Notary protocol storage settings are regulated in UUJN/UUJN-P. Notary protocol storage is carried out by a Notary, temporary Notary official substitute Notary, and MPD. In the UUJN/UUJN-P it is not clearly regulated, whether the Notary protocol is only stored using paper (conventional) media or can be stored digitally using electronic media. This is because the Notary protocol is a state archive, while the Archives Act provides arrangements related to being allowed to store archives using electronic media. Legal liability arising from the occurrence of violations or acts against the law, general provisions both civil, criminal, and administratively applicable to the Notary concerned. Another responsibility of the Notary holding the protocol is to keep the personal data of the parties confidential in connection with legal actions as outlined in the form of an authentic deed. The absence of rules governing the digital storage of Notary protocols has created a norm vacuum. So that the digital storage of the Notary protocol can only function as backup data.

Key Word : Legal Certainty, Notary Protocol, Notary.